

Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kemampuan Individu terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kapuas Hulu)

Bima Yoga Perkasa^a, Susilowati^a

^aMagister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak

*Email : yogabima@gmail.com

Abstrak

Efforts to equalize welfare nationally are carried out by the government through equalizing the quality of Human Resources (HR). Especially for border areas which are underdeveloped areas such as in West Kalimantan Province which borders Malaysia. Some of the areas include Sanggau Regency, Sintang Regency, Sambas Regency, Bengkayang Regency and Kapuas Hulu Regency. The purpose of this study was to determine the effect of community empowerment programs, individual capacity development on the sustainability of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in border areas. Community empowerment programs and individual capacity development have a positive and significant impact on the sustainability of MSMEs. In this study, the independent variable is the community empowerment program and individual capacity development, while the dependent variable is the sustainability of MSMEs.

This research is descriptive with quantitative approach with sampling technique using non-probability sampling method with accidental sampling technique. The results of the study indicate that the development of individual abilities has a more dominant influence on the sustainability of MSMEs compared to community empowerment programs. This is because skills are more influenced by direct experience in managing a business, while community empowerment programs need to be refocused on their implementation, which has a positive impact on the sustainability of MSMEs. Simultaneously shows that community empowerment programs and individual quality improvement have a significant effect on the sustainability of MSMEs in the border areas of West Kalimantan. This shows that partially the community empowerment program and individual quality improvement have a significant effect on the sustainability of MSMEs.

Kata kunci: *Border Areas, Community Empowerment, and Micro, Small and Medium Enterprises*

PENDAHULUAN

Daerah perbatasan merupakan wilayah kabupaten atau kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau lau lepas. Kawasan perbatasan ini yang dimaksud meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar (UU No. 26 tahun 2007). Salah satu wilayah perbatasan terdapat pada Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Beberapa wilayahnya antara lain Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan

Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa diantaranya masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal dengan ciri kondisi sosial budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain.

Dalam mengatasi permasalahan wilayah perbatasan, pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan menyetarakan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 terbentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP ini bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan di daerah perbatasan yang dikelola oleh berbagai sektor. Di sektor sosial, dalam penanganan permasalahan sosial diperlukan upaya yang sistematis dan tepat sasaran. Hal ini bisa dilakukan bila didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan reliable sesuai dengan kondisi obyektif wilayah perbatasan. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan reliable, akan menjadi acuan dalam penentuan kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan masyarakat wilayah perbatasan.

Upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya melibatkan intervensi dari luar, tetapi melibatkan pula potensi dan sumber daya masyarakat yang mungkin untuk dikembangkan. Upaya pemberdayaan haruslah responsif terhadap permasalahan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa upaya pemberdayaan dapat dirancang dengan baik apabila didukung oleh data dan informasi yang akurat tentang kondisi obyektif suatu masyarakat. Termasuk pada kawasan perbatasan di Kalimantan Barat, khususnya para pengusaha UMKM yang tercatat hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pengusaha UMKM Provinsi Kalimantan Barat Untuk Wilayah Perbatasan

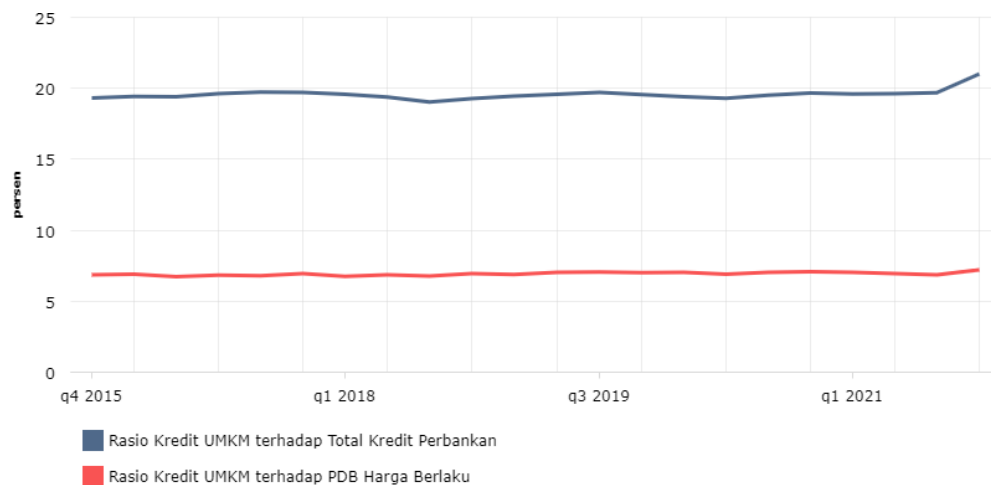
Kabupaten	Mikro		Kecil		Menengah		Total
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	
Sanggau	2.642	67,2%	1.228	31,2%	61	1,6%	3.931
Sintang	14.848	87,1%	2.102	12,3%	106	0,6%	17.056
Sambas	14.245	78,1%	3.845	21,1%	158	0,9%	18.248
Bengkayang	4.744	80,8%	938	16,0%	191	3,3%	5.873
Kapuas Hulu	6.702	67,6%	3.140	31,7%	65	0,7%	9.907
Total	43.181	78,5%	11.253	20,5%	581	1,1%	55.015

Sumber : Kementerian Koperasi, UMKM Provinsi Kalbar 2022

Dengan jumlah UMKM yang begitu banyak tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, permasalahan utama yang mereka alami adalah keterbatasan modal. Menurut Sudjito salah satu pegiat UMKM di Kabupaten Sambas menyatakan bahwa *“permasalahan kami disini lebih ke arah modal pak, kami jarang mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah namun akses untuk mendapatkan kredit KUR masih sangat terbatas nominalnya sedangkan usaha kami membutuhkan perputaran modal yang lebih besar”*. Hal ini senada dengan data yang dipaparkan oleh

Bank Indonesia atas dasar target porsi kredit UMKM yang ditentukan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 30% namun pada kenyataannya masih berkisar pada taraf 20%.

Gambar 1. Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan dan PDB Harga Berlaku



Sumber : Bank Indonesia (diolah oleh katadata.co.id)

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa kepercayaan pihak perbankan dipengaruhi oleh kinerja UMKM yang juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Suci (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah, lama pengelolaan dan tingkat pendapatan UMKM berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Sedangkan Maria (2020) menjelaskan bahwa program-program yang diberikan pemerintah terbukti positif mempengaruhi tingkat kesejahteraan Masyarakat di Kutai Barat Kalimantan Timur. Penelitian lainnya Maryani (2017) menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kampung wisata Kelurahan Tanggung Kota Blitar.

Berbagai penelitian sejenis dilakukan pada fokus satu lokasi penelitian, namun belum ada yang melakukan penelitian untuk daerah perbatasan. Satu penelitian karya Octaviani (2021) terkait kinerja pemasaran UMKM di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Kecamatan Jagoi) mempelajari strategi penetrasi pasar, tingkat kewirausahaan antar warga lokal dengan pendatang namun tidak membahas terkait UMKM secara menyeluruh. Sedangkan penelitian ini menangkap pembaharuan terkait topik penelitian tentang UMKM di wilayah perbatasan dengan acuan beberapa kabupaten sebagai tolak ukur pengukuran keberhasilan program pemberdayaan pemerintah dan peningkatan kemampuan individu terhadap keberlangsungan UMKM.

KAJIAN LITERATUR

Daerah Perbatasan

Pengertian daerah perbatasan bisa berarti suatu wilayah yang berada di perbatasan antar daerah dalam satu negara, atau daerah yang berada di perbatasan antar negara. Pada wilayah seperti ini komunikasi atau interaksi antar penduduk di dua daerah atau dua negara yang berbatasan biasanya cukup intensif. Pengertian daerah perbatasan menurut UU no. 26 Tahun 2007, adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. Sedangkan pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Di 38 Kabupaten/kota perbatasan prioritas terdapat 60 pulau dari keseluruhan 92 pulau kecil terdepan (65 %); 20 pulau berpenghuni dan 40 lainnya tidak berpenghuni.

Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia saat ini berubah orientasinya, dari "*inward looking*" menjadi "*outward looking*" sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Sedangkan pendekatannya selain keamanan, juga pendekatan kesejahteraan. Terkait dengan hal program-program bidang kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial) untuk wilayah perbatasan meliputi: 1) Penanggulangan kemiskinan; 2) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yang berfokus pada permukiman dan penyediaan infrastruktur; 3) Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS termasuk Anak, Lansia dan Peka.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah melalui pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kemampuan individu dan pemberian modal murah bagi para pengusaha lokal di wilayah perbatasan. Hal ini merupakan bentuk pengembangan yang berkesinambungan untuk terus menjaga nilai-nilai luhur Indonesia yang melihat potensi wilayah yang belum terasah maksimal. Khususnya para pengusaha Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bertanggungjawab untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat diberikan bantuan hibah modal kerja dan beberapa program yang dapat meningkatkan kemampuan individu yang terlibat di dalamnya.

Teori pengembangan manusia

Menurut Chamber dalam (Suharto, 2005) pemberdayaan sebagai paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*". Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), tetapi juga keberlanjutan pembangunan dalam masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang mempunyai kualitas DM yang cukup memadai,

akan memiliki keberdayaan yang tinggi. Selain itu nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat juga menjadi sumber keberdayaan, seperti kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam kerangka demikian diperlukan langkah-langkah positif, dan tidak hanya menciptakan iklim dan suasana. Upaya ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

Menurut Chaskin (2001), upaya-upaya pemberdayaan masyarakat (*community capacity building activities*) mencakup tiga tipe yaitu: 1) *development of skills-learning and training opportunities for individuals and groups, and sharing through networks and mutual support*; 2) *development of organizational structures and strengths of community groups and network*; and 3) *development of support to enable the development of skills and structures. Community capacity building then face great challenges in trying to act on two fronts at once: striving to enhance the capacities of social and institutional actors locally while strengthening their relationships with actors outside the community.*

Peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting dalam pemberdayaan. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi. Friedmann dalam (Kartasmita, 1996) menyatakan *"The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential sosial learning."*

Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas, upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu: (1) Menciptakan situasi atau iklim sosial yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Upaya adalah dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) tentang potensi yang dimiliki; (2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*strengtening*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai

peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya; (3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*).

Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Partomo (2004: 13) Kriteria umum usaha kecil dan menengah dilihat dari ciricirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi yang sangat sederhana
- b. Tanpa staf yang berlebihan
- c. Pembagian kerja yang “kendur”
- d. Memiliki hierarki manajerial yang pendek
- e. Hanya sedikit aktivitas yang formal dan jarang menggunakan proses perencanaan
- f. Tidak membedakan aset pribadi dan aset perusahaan meskipun sebagian ada yang sudah memisahkan pencatatan tetapi penggunaan keuangan masih tercampur satu sama lain.

Karakteristik UMKM menurut Sudarno (2011: 139) Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaannya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak Karakteristik UMKM menurut Sudarno (2011: 139)

Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaannya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak.

Menurut Sarwoko, Surachman, dan Hadiwidjojo (2013), kinerja bisnis dapat dipengaruhi oleh karakteristik kewirausahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jika individu memiliki karakteristik kewirausahaan yang beragam maka kemampuan

mereka untuk meningkatkan tingkat keberhasilan serta efisiensi usaha untuk bisnis UMKM meningkat. Selain itu, perilaku kepemimpinan yang benar dapat meningkatkan kinerja bisnis UMKM dan Arham, Boucher, dan Muenjohn (2013) menyatakan bahwa individu yang memiliki efek khusus pada perilaku kepemimpinan mampu meningkatkan kemungkinan keberhasilan wirausaha baik di perusahaan besar maupun kecil. Faktor lain seperti pasar dan modal, kurangnya infrastruktur, dan lingkungan politik yang mampu menentukan kewirausahaan berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan (Chowdhury, Alam, & Arif, 2013). Hal ini dapat didukung oleh penelitian Kemayel (2015) yang menyatakan bahwa faktor internal seperti karakteristik UMKM, karakteristik manajerial dan apakah bisnis dikelola mampu menentukan keberhasilan bisnis. Kamunge, Njeru, dan Tirimba (2014); Ushakov, (2017) mengemukakan bahwa kemungkinan pengusaha untuk mengakses informasi bisnis, infrastruktur, serta dukungan kebijakan pemerintah dapat menjadi pengaruh utama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diputuskan untuk menyelidiki program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kualitas individu untuk menentukan keberhasilan UMKM di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program pemberdayaan masyarakat, pengembangan kemampuan individu terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat antara lain Kabupaten Sangau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul yang berwujud angka-angka atau menggunakan alat statistik (Sugiyono, 2017).

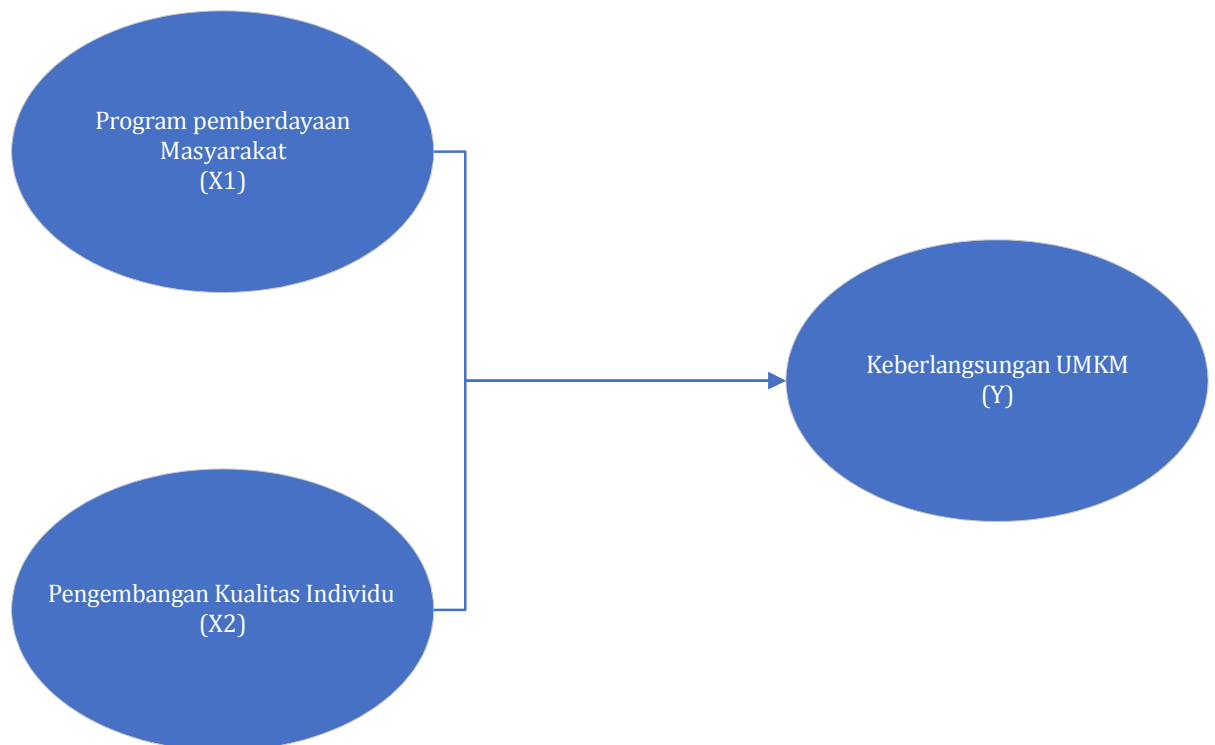
Dalam penelitian ini variabel independen yaitu program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemampuan individu, sedangkan variabel dependen yaitu keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. (Andiny & Nurjannah, 2018). Indikator variabel independen Pemberdayaan menurut (Arham *et.al.*, 2013) yaitu: 1) Kekuatan (*Empowering*), 2) Melindungi (*Protecting*), 3) Dukungan (*Supporting*), dan 4) Pengembangan (*Fostering*). Variabel pengembangan kemampuan individu merupakan bentuk pengembangan kualitas karyawan ataupun pengurus UMKM yang menjadi sampel penelitian yang didefinisikan sebagai manfaat dari berbagai bentuk peningkatan kualitas (pelatihan, pengayaan dan sebagainya).

Populasi dalam penelitian ini yaitu pegiat Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat antara lain Kabupaten Sangau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Secara populasi, terdapat 55.015 UMKM yang terdaftar pada dinas Koperasi dan UMKM per Maret 2022. Dalam penelitian kali ini, pemilihan

sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *caranon probability sampling* dengan teknik Aksidental Sampling. Untuk menentukan sampel penelitian menggunakan rumus Metode Jumlah Pertanyaan, yaitu melalui jumlah item-item pertanyaan pada kuesioner.

Caranya, mengalikan 5X jumlah item pertanyaan (Wiyono, 2011). Maksudnya adalah jumlah variabel dikali jumlah item pertanyaan. Berdasarkan cara tersebut, maka 3×40 pertanyaan = 120 sampel. Maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 120 responden. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan instrumen kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan kepada responden yang diteliti. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan *software* SPSS 21.

METODE PENELITIAN



Sumber Data Olahan Penulis

H_0 : Tidak ada pengaruh antar variabel

H_1 : Terdapat pengaruh variabel program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kualitas individu terhadap keberlangsungan UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa dari 55.015 UMKM yang berada di 5 Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya mendapatkan program penyaluran hibah maupun kredit modal kerja dengan bantuan bunga pemerintah. Secara kepengurusan, baru 4.564 UMKM yang memenuhi standar

perizinan NIB OSS yang menjadi dasar pengakuan pemerintah akan keberadaan UMKM tersebut. Berikut rinciannya :

Tabel 2. Perijinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB OSS)

Kabupaten	Total
Sanggau	1.261
Sintang	942
Sambas	1.053
Bengkayang	501
Kapuas Hulu	807
Total	4.564

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa sebagian besar UMKM belum dapat memenuhi standar persyaratan untuk verifikasi Nomor Izin Berusaha dari pemerintah. Hal ini berhubungan dengan tingkat penyaluran kredit kepada UMKM yang belum maksimal. Perkembangan kredit UMKM pada obyek penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Penyaluran Kredit Modal Kerja

Penyaluran Kredit Modal Kerja	Tahun					
	2019	%	2020	%	2021	%
Mikro	3.584	16,2%	3.117	13,8%	2.703	11,9%
Kecil	8.215	37,1%	8.316	36,7%	8.567	37,6%
Menengah	10.323	46,7%	11.219	49,5%	11.521	50,6%
Total	22.122	100,0%	22.652	100,0%	22.791	100,0%

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat 2022

Perkembangan penyaluran kredit modal kerja dari tahun 2019 hingga tahun 2021 memang tidak dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan yang optimal. Namun hal ini bukan merupakan kesalahan dari UMKM atas ketidakmampuan mereka menyelesaikan verifikasi NIB melainkan adanya dampak kejadian eksternal seperti adanya Pandemi akibat Covid-19 yang memperburuk kondisi keuangan secara mendasar. Melihat angka penyaluran kredit yang mencapai 22.791 UMKM dapat dikategorikan cukup baik jika dibandingkan total UMKM yang terdaftar yakni sebanyak 55.015 sehingga secara persentase jumlah penyaluran kredit pada UMKM sebesar 41,43%. Namun pemerintah tidak hanya meluncurkan program kredit UMKM tetapi juga memberikan Bantuan Presiden untuk pengusaha dengan program BANPRES PRODUKTIF. Untuk daftar realisasi BANPRES PRODUKTIF dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Data Penerima BANPRES PRODUKTIF

Kabupaten	Usulan	Realisasi	
		2020	2021
Sanggau	2.259	4.792	8.647
Sintang	3.139	5.715	31.457
Sambas	9.528	12.783	12.237
Bengkayang	3.946	3.339	5.495
Kapuas Hulu	1.174	2.141	4.307
Total	20.046	28.770	64.164

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat 2022

Program ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Total realisasi yang melebihi 100% dikarenakan bantuan dihitung berdasarkan jumlah frekuensi pemberian bantuan meskipun pada penerima yang sama akan dihitung total pemberiannya. Belum ada data spesifik tentang seberapa besar resapan dari UMKM terkait realisasi program ini namun secara keseluruhan keberadaan program ini membantu meringankan beban operasional bagi para UMKM.

Tabel 5 F-test ANOVA

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	f	Sig.
1.	Regression	1951,05	2	925,52	62,88	001.a
	Residual	1721,86	117	14,71		
	Total	3572,92	119			

Regresi linier berganda diterapkan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan dan keterampilan SDM terhadap kinerja UMKM. Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Persamaan regresi linier berganda memiliki rumusan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \varepsilon$$

Sehingga diperoleh persamaan:

$$Y = 6.91 + 0.17x_1 + 0.65x_2$$

Dengan estimasi standar deviasi 3,83. Deskripsi regresi linier berganda persamaan di atas adalah sebagai berikut (lihat tabel 6).

Tabel 6. Regresi dan T-Test

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	6,91	1,46		4,71	.001

Program Pemberdayaan Masyarakat	.17	.07	.16	05.16	.028
Pengembangan Kualitas Individu	.65	.07	.61	8,22	.001

Angka konstan (b_0) sebesar 6,91 menunjukkan besarnya kinerja UMKM jika program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kualitas individu sebesar 0. Koefisien regresi pertama (b_1) sebesar .17 menunjukkan besarnya pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap keberlangsungan UMKM dengan mengasumsikan pengembangan kualitas individu yang konstan. Artinya jika faktor program pemberdayaan masyarakat bertambah 1 satuan, maka diprediksi keberlangsungan UMKM akan meningkat sebesar 0,17 satuan dengan asumsi pengembangan kualitas individu konstan.

Koefisien regresi kedua (b_2) sebesar 0,65 menunjukkan besarnya pengaruh pengembangan kualitas individu terhadap keberlangsungan UMKM dengan asumsi program pemberdayaan masyarakat konstan. Artinya jika faktor pengembangan kualitas individu meningkat sebesar 1 unit, maka keberlangsungan UMKM diprediksi akan meningkat sebesar 0,65 unit dengan asumsi program pemberdayaan masyarakat konstan. Prosedur, kriteria dan pengujian penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis:

H_0 : Tidak ada pengaruh antar variabel

H_1 : Terdapat pengaruh variabel program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kualitas individu terhadap keberlangsungan UMKM

b. Alpha (α) = 0.05; k (jumlah variable yang dianalisis = 3); N = 120, maka berdasarkan nilai f -ratio diperoleh nilai 5 persen (2: 117) sebesar 3.05.

c. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Jika $f_{hitung} > f_{table}$, maka H_1 dapat diterima, dimana jika $f_{hitung} < f_{table}$, maka H_1 (hipotesis) ditolak.

d. Berdasarkan uji f yang dihitung adalah 62.88, $f_{hitung} > f_{table}$ (3.05), maka H_1 dapat diterima (lihat Table 5).

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel X_1 dan X_2 terhadap Y dilakukan uji- t seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.

Prosedur, kriteria penerimaan dan penolakan dan hasilnya ditunjukkan di bawah ini:

a. Hipotesis :

H_0 : $b_1 = 0$ artinya program pemberdayaan pemerintah tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM.

$H_1 : b_1 \neq 0$ artinya program pemberdayaan pemerintah berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM.

- b. Pengujian hipotesis : Bila $t_{hitung} > t_{tabel} (\alpha, N-k-1)$, maka H_0 ditolak yang berarti program pemberdayaan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya pengembangan kemampuan individu tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM.
- c. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS didapatkan t_{hitung} sebesar 2,22.
- d. Dengan $\alpha = 5\%$, $t_{tabel} (5\%; 120)$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,65. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (2,22) > t_{tabel} (1,65)$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, artinya pengembangan kualitas individu berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. Pengujian hipotesis pengaruh pengembangan kualitas individu terhadap keberlangsungan UMKM (X_2).

Prosedur dan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hipotesis
 $H_0 : b_1 = 0$ artinya pengembangan kemampuan individu tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM. $H_1 : b_1 \neq 0$ artinya pengembangan kemampuan individu berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM.
- b. Pengujian Hipotesis Apabila $t_{hitung} > t_{tabel} (\alpha, N-k-1)$, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa pengembangan kemampuan individu berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima yang artinya pengembangan kemampuan individu tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM.
- c. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS diperoleh t_{hitung} sebesar 8,22.
- d. Dengan $\alpha = 5\%$, $t_{tabel} (5\%; 120)$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,65. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (8,22) > t_{tabel} (1,65)$, dengan demikian H_1 diterima yang artinya pengembangan kemampuan individu berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM.

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemampuan individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan UMKM, dimana faktor pengembangan kemampuan individu lebih dominan pengaruhnya terhadap keberlangsungan UMKM jika dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat.

PEMBAHASAN

Program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemampuan individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. Artinya semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia maka

keberlangsungan UMKM semakin baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemampuan individu perlu ditingkatkan dan dipertahankan untuk mendorong karyawan mencapai kinerja yang lebih baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan keberlangsungan UMKM. Pengaruh positif dan signifikan variabel pengetahuan ini sejalan dengan teori bahwa pengetahuan berperan penting dalam mempersiapkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Karena pengetahuan menjadi pusat dari segala perubahan dan harus disikapi dengan tepat.

Dengan tersedianya sumber daya manusia yang terampil untuk mengelola UMKM, diharapkan kinerja yang lebih baik di perusahaan-perusahaan ini akan tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan individu memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap keberlangsungan UMKM dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan keterampilan lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman langsung dalam mengelola bisnis, sedangkan program pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan kembali fokus penerapannya agak berimbang positif pada keberlangsungan UMKM. Namun perlu disadari bahwa peningkatan kualitas individu merupakan salah satu hasil keluaran dari program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada individu. Hal ini perlu dipertegas bahwa program pemberdayaan masyarakat yang diambil pada penelitian ini cenderung memiliki arti lebih luas termasuk pada pemberian bantuan finansial dan aksesibilitas untuk UMKM.

SIMPULAN

Secara simultan menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas individu berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas individu berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. Faktor peningkatan kualitas individu memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap keberlangsungan UMKM dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mengembangkan UMKM, sangat penting untuk memperhatikan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemilik UMKM. Banyak program pemerintah yang ditujukan untuk memajukan UMKM di Indonesia namun belum menyeluruh dalam pelaksanaannya. Mereka harus sangat memperhatikan kemampuan dan keterampilan UMKM agar memiliki kinerja yang lebih baik.

REFERENSI

Andiny, P., & Nurjannah. (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 31-37.

- Arham, A. F., Boucher, C., & Muenjohn, N. (2013). Leadership and entrepreneurial success: A study of SMEs in Malaysia. *World*, 3(5), 117-130.
- Chaskin, R. J. (2001). Building Community Capacity: A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative. *Urban Affairs Review*, Vol. 36, Hal. 291-323
- Chowdhury, M. S., Alam, Z., & Arif, M. I. (2013). Success factors of entrepreneurs of small and medium sized enterprises: Evidence from Bangladesh. *Business and Economic Research*, 3(2), 38-52.
- Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat (2022) Laporan Perkembangan Koperasi UMKM.
- Kamunge, M. S., Njeru, A., & Tirimba, O. I. (2014). Factors affecting the performance of small and micro enterprises in Limuru Town Market of Kiambu County, Kenya. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 4(12), 1-20.
- Katadata, 2002. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/jokowi-targetkan-rasio-kredit-umkm-30-bagaimana-posisinya-sekarang>
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat - Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Penerbit PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kalimantan-Barat-Agustus-2021.pdf (bi.go.id)
- Maria, A. (2020) PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KENYAYAN KECAMATAN SILUQ NGURAI KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Administrasi Publik* Vol 1 No. 2
- Maryani, T. (2017) Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Home Industri Kerajinan Bubut Kayu Dikampung Wisata Kelurahan Tanggung Kota Blitar. Bachelor thesis, STP AMPTA Yogyakarta.
- Octaviani, D. (2021) KINERJA PEMASARAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT (STUDI DI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG). *PROCEEDING THE 8th MANAGEMENT BREAKTROUGH AND DOCTORAL JOURNEY 2020*
- Partomo, Tiktik S., Abdullah, R.S. (2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesi

- Sarwoko, E., Surachman, A., & Hadiwidjojo, D. (2013). Entrepreneurial characteristics and competency as determinants of business performance in SMEs. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 7(3), 31-38.
- Suci N.I.S. (2021) Pengaruh Pemberdayaan, Lama Mengelola dan Pendapatan Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*. Volume VIII Nomor 1, 2021
- Sudarno. 2011. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Depok. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2 No.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ushakov, A. (2017). Learning Content Management Systems in Flt: Canadian Experience. *International Journal of English Language and Literature Studies*, 6(1), 25-32
- UU No. 26 tahun 2007
- Wiyono, G. (2011). *Merancang penelitian bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. In Yogyakarta: UPP STIM YKPN